

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka diambil kesimpulan tentang Mekanisme Validasi Dalam Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No.4 tahun 2010 yang menerangkan bahwa pejabat yang berwenang mengesahkan suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu notaris PPAT, pejabat lelang dan pertanahan hanya dapat menandatangani Akta, risalah lelang dan keputusan pemberian hak atas tanah dan bangunan. Setelah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang merupakan wajib pajak yang menyerahkan bukti pelunasan BPHTB terutang yang sebelumnya harus divalidasi ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Validasi ini merupakan upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan kebenaran atas objek pajak yang dilaporkan apakah sama disertifikat dengan objek yang tercantum pada SPPT yang diterbitkan oleh Bapenda. Dan untuk mengurangi tingkat kecurangan Wajib Pajak dalam membayar pajak BPHTB.
3. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA kota Pekanbaru penerimaan pajak BPHTB selalu meningkat dan melebihi target, kecuali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tahun 2015,2016 penerimaan pajak BPHTB relatif lebih sedikit dan tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan karena tingkat implasi ekonomi masyarakat tidak stabil sehingga tingkat daya beli dan jual beli masyarakat berkurang.

Dalam pelaksanaan Validasi di BAPENDA Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru NO.4 tahun 2010 dan Validasi Pajak BPHTB di Kota Pekanbaru sudah efektif.

## B. Saran

Setelah penulis mengamati, menganalisa secara sekilas tentang Mekanisme Validasi Dalam Pemungutan Pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk masukan bagi Badan Pendapatan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Berhubung masih kurangnya pemahaman wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Sebaiknya pihak BAPENDA perlu dicarikan solusi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam membayar pajak BPHTB dengan membuat alur atau bagan yang dimengerti oleh wajib pajak.
2. Perlunya sosialisasi system online dalam bentuk website Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan penjelasan atau informasi mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana proses dalam membayar pajak BPHTB khususnya dari segi validasi.

3. Meningkatkan penerimaan pajak BPHTB perlu diimbangi dengan upaya peningkatann kualitas sumber daya manusia yang ada di BAPENDA dari semua umur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak BPHTB yang optimal dan sistem pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.
4. Untuk Wajib Pajak diharapkan lebih produktif dengan memberikan data-data atau dokumen yang benar-benar untuk mendukung perhitungan Pajak BPHTB agar dapat berjalan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Wajib pajak harus sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak tidak merasa dirugikan atas pemungutan pajak.